UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK POLITIK DI INDONESIA

Oleh : Dr. Syukri, M.A

ABSTRAK

Tulisan ini dilatar belakangi oleh adanya isu besar yang ada di Indonesia tentang kegaduhan dan kekisruhan yang terjadi ditengah perpolitikan yang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini. Dimana kegaduhan dan kekisruhan politik tersebut banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat terutama kehidupan umat beragama. Ketegangan yang terjadi ditengah kehidupan beragama berakibat negatif terhadap pembangunan bangsa.

Adapun yang menjadi pokok pikiran dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: 1) hubungan politik dan kerukunan beragama, 2) faktor penyebab terjadinya konflik di Indonesia 3) upaya penyelesaian konflik politik di Indonesia

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menekankan pada analisis masalah yang tengah terjadi di masyarakat Indonesia saat ini.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa konflik dapat diselesaikan dengan membangun resolusi dan suasana perdamaian dengan menggunakan Pendekatan Kultural dalam bentuk aktualisasi kearifan lokal pada masyarakat.

Kata Kunci : *Agama, Kearifan, Konflik Dan Politik.*

I. PENDAHULUAN

Dalam masyarakat majemuk seperti di Indonesia, agama dapat menjadi faktor pemersatu bangsa, dan sekaligus pemicu konflik.¹ Konflik agama lebih sering merupakan manifestasi dari konflik sosial dengan simbol-simbol keagamaan untuk tujuan-tujuan tertentu. Padahal banyak resolusi dan cara bagi umat beragama untuk hidup rukun, damai dan bertoleransi positif, serta dapat bekerjasama secara akrab dalam reformasi sosial, baik secara komunal maupun institusional.

Dalam upaya menyelesaikan konflik politik dan menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia, maka peranan agama dan peran Lembaga Keagamaan sangat urgen, karena peran agama dan institusi keagamaan dalam perubahan sosial ataupun

¹ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan bahwa konflik adalah percekocokan, pertikaian dan pertentangan di dalam antara satu tokoh dengan yang lain, atau pertentangan dua tokoh konflik yang disebabkan oleh adanya dua atau lebih gagasan atau keinginan yang bertentangan menguasai diri individu sehingga mempengaruhi tingkah laku. Lihat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet.II, 1989), hlm. 455.

transformasi sosial yang terwujud dalam bentuk masyarakat madani (*civil society*)² tidaklah berjalan sendiri. Hal ini tentunya memerlukan media atau pelaku untuk melakukan berbagai perubahan. Salah satu *agent of the change*-nya cukup strategis, dan bisa diandalkan adalah institusi-institusi yang berada di tengah masyarakat plural itu sendiri.

Dalam konteks idealisasi kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia, Munawir Syadzali mengemukakan bahwa dalam menghadapi masalah nasional hendaknya semua umat dari berbagai agama dapat berfikir dan bertindak sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan sasaran yang tunggal, yaitu keberhasilan pembangunan. Masalahnya bukan apakah agama itu *deviding factor* atau *uniting factor* saja, karena sekarang sudah harus lebih maju lagi, yaitu harus mengamankan negara dan pembangunan dan faktor pemecah, termasuk perpecahan dalam agama.³

Munawir Syadzali juga mengatakan bahwa perbedaan antara lapisan atas (Pemerintah), dan lapisan bawah (rakyat) yang tercermin dalam kebijakan dan proses pembaharuan di Indonesia, secara langsung ataupun tidak langsung menimbulkan persoalan juga di tingkat kerukunan hidup antar umat beragama. Paling tidak, konflik-konflik bernuansa agama.⁴ Maka untuk mewujudkan dan mempersatukan hidup rukun dan damai yang didambakan anak bangsa di Indonesia ini pada akhirnya memerlukan upaya-upaya yang serius dengan melibatkan peran agama itu sendiri, peran tokoh agama, Intelektual, masyarakat maupun peran yang dilakukan oleh berbagai institusi yang mengatasnamakan agama.

Secara kronologis, isu utama yang melatarbelakangi konflik antar umat beragama di Indonesia, yaitu penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah, termasuk adanya prasangka yang tidak baik terhadap kelompok tertentu, adanya diskriminasi, adanya kesenjangan ekonomi, dan adanya perbedaan ideologi.⁵ Faktor- faktor di atas yang menyebabkan terjadinya konflik antar umat beragama di Indonesia, akan tetapi

² Istilah *civil society* juga ada yang mengartikannya identik dengan “masyarakat berbudaya” (*civilized society*). Lawannya, adalah masyarakat liar (*savage society*). Lihat Abdul Aziz Thaha, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.50. Eksistensi dari *civil society* sebagai sebuah abstraksi sosial diperhadapkan secara kontradiksi dengan masyarakat alami (*natural society*), lihat Arief Budiman “Introduction From A Conference to a Book” dalam Arief Budiman (ed). *State and Civil Society in Indonesia* (Clayton, Victoria: Center of South East Asean Studies Monash University, 1991), hlm. 3-4. juga Neece Chandoke, *State and Society: Exploration in Political Theory* (New Delhi: Sage Publication Indonesia Pvt, Ltd., 1995), hlm. 36.

³ Munawir Syadzali, *Agama dan Pluralisme Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: P3M, 1991), hlm. 18.

⁴ *Ibid.*

⁵ Agus Fathurrahman, “Pertentangan-Pertentangan Sosial dan Integrasi Masyarakat”, dalam Darmasayah, et.al, *Ilmu Sosial Dasar (Kumpulan Essei)*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 238.

kemudian masyarakat yang berkonflik antar umat beragama yang berbeda itu, memiliki strategi atau resolusi sendiri untuk membangun suasana perdamaian serta kerukunan, di antara strategi yang dibangun itu adalah dengan menggunakan pendekatan kultural, struktural, dialog, musyawarah antar umat beragama.

Namun perlu dipahami bahwa strategi dan resolusi di atas yang telah dirintis oleh pemerintah dan para pemuka agama untuk tegaknya sendi-sendi kehidupan bangsa dengan mengembangkan konsep kerukunan dan toleransi beragama di Indonesia perlu ditinjau ulang, karena strategi yang dilakukan oleh pemerintah kelihatannya belum maksimal, oleh karena itu perlu di tindaklanjuti secara serius dan sungguh-sungguh. Sebab meski berbagai formulasi dialog yang dibangun oleh pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan seperti; Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) dan Forum Komunikasi Pemuka Agama (FKPA) di Indonesia belum sepenuhnya mampu memberi resolusi dan mengorganisir konflik-konflik sosial keagamaan dengan baik, oleh karena semangat membangun kerukunan selama ini dilihat sebagai tugas masyarakat.

Oleh karena itu perlu strategi atau resolusi yang tepat untuk membangun kerukunan antar umat beragama di Indonesia harus mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Negara dan ideologi yang final bagi antar umat beragama di Indonesia, termasuk Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebab keberlangsungan bangsa, dan agama di Indonesia sangat tergantung kepada empat hal di atas sebagai pemersatu antar umat beragama sebagaimana dilukiskan dalam semboyan negara “Bhinneka Tunggal Ika” yaitu bersatu sekalipun ada perbedaan ragam.

II. FAKTOR- FAKTOR TERJADINYA KONFLIK DI INDONESIA

Konflik-konflik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia bukan hanya dilahirkan oleh agama dan antar umat beragama, tetapi juga dilahirkan oleh konflik antar peradaban.⁶ Di Indonesia konflik-konflik yang dilahirkan oleh agama dan antar

⁶ Konflik antar peradaban, khususnya antara Islam Versus Barat, semakin banyak dibicarakan, dan banyak orang yang mengasosiasikannya dengan perwujudan dari “benturan antara peradaban” yang didengungkan oleh Samuel Huntington beberapa tahun yang lalu. Banyak orang cemas bahwa konflik atau benturan ini akan meledak dan meluas serta membawa kehancuran dan menjatuhkan manusia ke “jurang tanpa dasar”. Lihat, Azyumardi Azra, *Konflik Baru Antar Peradaban Globalisasi, Radikalisasi & Pluralitas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan II. 2002), hlm. Kulit luar.

umat beragama, seperti kerusuhan di Situbondo pada bulan Oktober 1996, pada penghujung Desember 1996 muncul kerusuhan serupa di Tasikmalaya ini muncul sebelumnya (1990), dan lain-lain sebagainya.

Kasus yang cukup signifikan untuk dikemukakan di sini adalah ketika sensitivitas massa Islam terkoyak oleh Arswendo Atmowiloto mengadakan kuis di Tabloid Monitor yang merengking Nabi Muhammad Saw., yang hasilnya melecehkan umat Islam tahun 1996. Kemudian pada awal 1997 konflik serupa pecah di rengasdengklok, tahun 1998 pecah insiden Ketapang, yang kemudian berlanjut pada tragedi Kupang. Pada tahun yang sama, bertepatan dengan hari raya Idul Fitri insiden Ambon pecah, sebagai kelanjutan dari konflik tersebut terjadi pertikaian antara agama di Helmahera dan Poso. Dalam demonstrasi mahasiswa terjadi pelecehan membuang najis di Mesjid, dan lain-lain sebagainya.

Terjadinya konflik agama dan antar umat beragama di atas, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah, Pertama; Penyiaran agama masing-masing antar umat beragama di Indonesia turut mempengaruhi munculnya konflik, seperti pidatonya Paus Bedeniktus XVI yang terjadi pada bulan September 1996 yang lalu kembali terusik akidah umat Islam, dalam pidatonya berisikan melecehkan dan menghina Nabi Muhammad Saw, dengan menyebut bahwa Nabi Muhammad Saw tidak ada apa-apanya, tak ubahnya sebagai setan yang menyebarkan Islam dengan pedang dan kekerasan. Di Sumatera Utara ada kegiatan syiar agama Kristen yang dikenal dengan istilah “Pesparawi” (Paduan Suara Lagu-lagu Gerejawi)⁷, misalnya yang mendapatkan jemaatnya di Asrama Haji Pangkalan Masyhur Medan, mengundang kemarahan umat Islam di Sumatera Utara, dan lain-lain sebagainya.

Kedua; Pendirian rumah ibadah antar umat beragama juga menjadi salah satu faktor munculnya konflik di Indonesia, banyak kasus terjadi seperti di Sumatera Utara misalnya ada penyalahgunaan izin pendirian panglong kayu menjadi pendirian rumah ibadah umat Buddha (Pekong) di Marelan Medan Labuhan, yang menimbulkan konflik antara umat Islam dengan umat Buddha, dan banyak lagi contoh-contoh lain pendirian rumah ibadah menjadi faktor munculnya konflik di Indonesia. Ketiga ; faktor diskriminasi. Selain penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah sebagai dua

⁷ *Pesparawi* yang dimaksudkan adalah mengumandangkan Lagu-lagu keagamaan atau lagu-lagu suci dalam Agama Kristen. Sama halnya dengan pelaksanaan syiar agama dalam Islam, seperti Musabaqah Tilawatil Qur'an yang dilaksanakan umat Islam. Justru pelaksanaan syiar *Pesparawi* ini ditempatkan di Asrama haji Medan, sudah barang tentu dapat memicu terjadinya konflik antar umat beragama, khususnya umat Islam dan umat Kristiani.

isu utama yang melatarbelakangi terjadinya konflik antar umat beragama di Indonesia, diskriminasi antar umat bergama juga dapat melahirkan konflik. Diskriminasi berawal dari prasangka yang intens dan etnosentris⁸ fanatis yang membawa kepada penetapan-penetapan *stereotype* kelompok-kelompok lain, untuk memperoleh keuntungan yang berorientasi kepada ekonomi dan politik. Keempat, Faktor Pilpers dan Pemilihan Legislatif yang baru saja usai dilaksanakan secara serentak oleh masyarakat Indonesia tahun 2019, dapat menimbulkan konflik politik di Indonesia.

Kelima; Kesenjangan ekonomi, baik antar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok tertentu, termasuk kesenjangan ekonomi antar umat beragama, juga turut menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya konflik, hal ini disebabkan karena perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi, sehingga terjadi penumpukan kekayaan (monopoli) pada seseorang atau kelompok, sementara orang lain atau kelompok lain semakin terpuruk dan miskin, dan Keenam; Faktor perbedaan ideologi,⁹ terutama sering menjadi pemicu konflik. Setiap individu atau kelompok akan menganggap bahwa paham ideologi atau agama yang mereka anut adalah yang terbaik atau yang lebih benar. Sementara ideologi, paham atau agama orang lain atau kelompok lain salah, tidak benar, akibatnya dapat melahirkan sentimen yang dapat melatarbelakangi konflik antar umat beragama di Indonesia.

Faktor penyebab utama yang melatarbelakangi munculnya konflik antar umat beragama di Indonesia adalah faktor perbedaan ideologi dijadikan faktor dominan, dari sekian banyak faktor yang telah dinukilkan di atas, karena kajian ideologi ini selalu atau sering difokuskan pada konflik antar agama, yang sering dipicu oleh muatan dokmatis atau misi agama dengan tidak menafikan faktor-faktor lainnya.

⁸ *Etnosentris* yang dimaksudkan disini adalah suatu kelompok etnis tertentu cenderung merasa kelompoknya yang lebih baik daripada kelompok etnis yang lain, bahkan merasa yang paling terbaik. Lihat Fathurrahman, *Pertenatangan, Op.cit.*, hlm. 238.

⁹ Istilah ideologi pertama kali diciptakan oleh Desstutt de Tracy tahun 1796 di Prancis. Istilah ideologi menurut Ricoeur menyatakan bahwa ideologi itu merupakan istilah yang mengandung sifat dasar permulaan yang sangat mendua, ambigu; sisi positif dan negatif, konstruktif dan destruktif, dimensi konstruktif dan patologis. Selain itu, dinyatakan pula bahwa ideology selalu merupakan kosakata yang bersifat polemis. Lihat, Paul Ricoeur, *Lectures on Ideologi and Utopia*, (New York: Columbia University Press, 1986), hlm. 24.

III. UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK POLITIK DI INDONESIA.

Dalam kamus, “*An-English- Indonesian Dictionary*” Istilah resolusi “*resolution*” diartikan dengan pemecahan, atau ketetapan hati.¹⁰ Sedangkan dalam “*Kamus Ilmiah Populer*”, resolusi diartikan keputusan, Pemisahan, usul, ketetapan dengan teguh.¹¹ Jadi resolusi dipahami sebagai upaya pemecahan atau penyelesaian masalah yang berkaitan erat dengan benturan antar individu dengan individu yang menganut idealisme agama dan benturan antar umat beragama di Indonesia.

Menurut Robert Jhohn Ackerman dalam bukunya “*Agama Sebagai Kritik*” menjelaskan bahwa dalam sistem hukum, individu- individu berkonflik, dan konflik mereka diselesaikan.¹² Upaya penyelesaian dan pemecahan benturan-benturan antar individu-individu yang religiusitas yang dimaksudkan inilah yang dapat dipahami sebagai resolusi konflik. Secara kronologis ada beberapa strategi yang ditempuh dalam membangun perdamaian atau resolusi konflik di Indonesia yaitu :

1. Dengan menggunakan Pendekatan Kultural.

Pendekatan kultural merupakan salah satu strategi yang ditempuh dalam membangun perdamaian atau penyelesaian konflik antar umat beragama di Indonesia, sebab dengan pendekatan ini dapat mempertemukan tradisi masyarakat yang plural dalam bentuk aktualisasi kearifan lokal.¹³ Kearifan Lokal sesungguhnya adalah nilai-nilai universal agama dan budaya yang dimanifestasikan dalam tradisi setempat.¹⁴ Jadi dengan menggunakan pendekatan kultural antar umat beragama dapat dipertemukan, dan masing-masing agama menjadi membudaya atau membumi

¹⁰ John M. Echols, “An English-Indonesian Dictionary” (Ithaca and London: Cornell University Press, (Terj) Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 481.

¹¹ Widodo, (et.al), *Kamus Ilmiah Populer Dilengkapi EYD dan Pembentukan Istilah*, (Yogyakarta: Penerbit, Absolut, Cet.II, 2002, hlm.647.

¹² Robert John Ackermann, *Agama Sebagai Kritik, Analisis Eksistensi Agama-Agama Besar*, (Jakarta: Penerbit, PT.BPK Gunung Mulia, 1997), hlm.151-152.

¹³ Kearifan lokal dimaksudkan adalah kearifan untuk rukun. Kearifan ini tercipta bukan karena rekayasa, bukan karena pemerintah, bukan karena SKB atau peraturan undang-Undang, tetapi karena budaya masyarakat di dalamnya ada kerukunan. Misalnya, karena Pakciknya itu terjadi kedamaian dengan dia, karena itu moranya, karena itu anak borunya dia merasa aman, dan lain-lain sebagainya. Satu contoh ia harus hormat terhadapnya, itu dari sudut budaya lokal. Sedangkan dari sudut agama karena itu manusia yang muliakan oleh Tuhan harus dihormati dan dimuliakan pula. Keadaan seperti ini yang dapat dijadikan sebagai kearifan lokal dalam masyarakat Indonesia.

¹⁴ Lihat Ridwan Lubis, dalam Syllabus Mata Kuliah “*Agama Dan Perdamaian*”, (Medan: Program Pascasarjana S-3 IAIN Sumatera Utara, 2008), hlm. 9.

ditengah-tengah masyarakat yang berbeda agama, sehingga mereka antar pemeluk agama dapat berdamai, dan bekerjasama secara harmonis.

2. Dengan menggunakan Pendekatan Struktural.

Pendekatan Struktural salah satu strategi membangun perdamaian. Pendekatan ini dimaksudkan adalah adanya lembaga-lembaga kerukunan,¹⁵ baik yang dibawa oleh lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kerukunan maupun gagasan dan lembaga baru yang diperkenalkan oleh pemerintah.¹⁶ Melalui pendekatan struktural ini juga penganut antar umat beragama dapat dipertemukan dalam bentuk kerukunan Umat beragama melalui berbagai institusi-institusi keagamaan yang ada di Indonesia. Salah satu contoh misalnya FKPA dapat menjalin berbagai kemitraan dengan LPKUB, seperti teori-teori kerukunan yang yang dikembangkan LPKUB sangat relevan dengan kerukunan yang diterapkan oleh FKPA.

Demikian juga peran MUI dalam melakukan deteksi dini terhadap fenomena yang membawa terganggunya kerukunan umat beragama, serta mengkaji setiap kasus konflik sosial dan agama sangat relevan dengan tugas PGI tentang kerukunan. Menurut mereka Kerukunan yang benar dan sejati adalah seseorang tidak merelatifkan perbedaan dan tidak juga mengabsolutkannya dalam hal yang mungkin biasa dihubungkan, berdialog dan bekerjasama.¹⁷ Demikian juga dengan lembaga-lembaga keagamaan lainnya dapat menemukan strategi membangun perdamaian antar umat beragama di Indonesia.

3. Dengan menggunakan Pendekatan Dialog.

Salah satu cara mengungkapkan kerukunan dan sekaligus meneguhkannya adalah menggiatkan dialog,¹⁸ karena dengan pendekatan dialog¹⁹ juga merupakan

¹⁵ Lembaga-lembaga Kerukunan Antar Umat Beragama di Indonesia meliputi; Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Parisdha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), Forum Komunikasi Pemuka Agama (FKPA), Lembaga Kerukunan Umat Beragama (LKBUB), dan lain-lain sebagainya.

¹⁶ Lihat, Ridwan Lubis, *Syilabus, op.cit.*, hlm. 9.

¹⁷ Lihat, Djaka Soetapa, *Dialog Kristen - Islam: Suatu Uraian Teologis*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Inivasi Pendidikan Duta Wacana, 1987), hlm. 7.

¹⁸ A.A. Yewangoe, *Agama Dan Kerukunan*, (Jakarta: Penerbit, PT. BPK Gunung Mulia, Cetakan ke-2,2002), hlm. 105.

resolusi yang tepat dalam membangun perdamaian antar umat beragama, karena menurut Said Agil Husin Al-Munawar bahwa kerukunan umat beragama di Indonesia merupakan salah satu hasil dari dialog.²⁰ Selaras dengan Bossona Tibi mengatakan bahwa dialog merupakan cara terbaik dalam membuat pengertian guna menegakkan perdamaian di dunia. Namun wacana apa yang mesti digunakan di dalam dialog semacam ini ? maka harus ada suatu consensus bersama tentang bentuk wacana yang akan dapat disepakati oleh semua pihak.²¹ Jadi dengan pendekatan dialog ini juga antar umat beragama di Indonesia dapat dipertemukan dalam menciptakan kedamaian. Dengan dialog ini segala masalah keagamaan dan sosial dapat diselesaikan dan disepakati antar pemeluk agama masing-masing. Wacana dialog ini merupakan suatu resolusi yang tepat, dan terus ditumbuhkembangkan pada saat ini, baik mengenai doktrin agama-agama, maupun mengenai kerjasamna dan hubungan sosial lainnya.

Selain menggunakan tiga pendekatan di atas, ada juga empat hal strategi membangun perdamaian antar umat beragama, yakni; Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebab keberlangsungan bangsa Indonesia kata Prof. Dr .H. M.Ridwan Lubis akan sangat tergantung kepada empat hal tersebut di atas, yaitu ;²²

1. Pancasila

Salah satu upaya membangun strategi perdamaian antar umat beragama adalah Pancasila,²³ karena Pancasila dapat berfungsi sebagai bagian terpenting dari faktor-

¹⁹ Zakiyah Drajat, membagi dialog kepada dua bagian yaitu; Dialog Formal (Verbal), dan dialog Karya. Dialog Formal adalah dialog mengenai suatu doktrin tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak. Sedangkan Dialog Karya (informal) adalah mencakup segala bentuk pergaulan, kerjasama, hubungan sosial antar penganut yang berbeda – beda agama, Lihat, Zakiyah Drajat, (et.al) *Perbandingan Agama*, (Jakarta : Bumi Aksara, Depag RI, 1996), hlm. 144.

²⁰ Lihat, Said Agil Husain Al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Diterbitkan oleh PT Ciputat Press, 1997), hlm. 144.

²¹ Lihat Bossona Tibi, dalam Nurcholis Madjid, (et.al), *Agama Dan Dialog Antar Peradaban*, (Jakarta : Penerbit, Paramadina, 1996), hlm. xxii.

²² Lihat Ridwan Lubis, *Syilabus, loc.cit.*

²³ Secara harfiah, Pancasila berarti lima prinsip (berasal dari bahasa Sanskerta; *Panca* artinya lima, dan *sila* artinya prinsip). Sesungguhnya, istilah Pancasila telah digunakan oleh Empu Prapanca dalam bukunya yang sangat terkenal, “*Nagarakertagama*”, dan Empu Tantular dalam bukunya, “*Sutasoma*”. Kedua penulis ini adalah pemikir dan pujangga ternama pada zaman pemerintahan Hayam Wuruk di Kerajaan Hindu Majapahit. Lihat Muhammad Yamin, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, (Jakarta; Yayasan Prapanca, tt.), hlm. 439,445.

faktor pemersatu Indonesia.²⁴ Pancasila juga merupakan satu-satunya azas dalam kehidupan berbangsa, beragama dan bernegara, serta memiliki relevansi dalam berbagai aspek kehidupan antar umat beragama di Indonesia. Pancasila bukan hanya berperan sebagai dasar Negara, melainkan juga *falsafah* dan ideologi bangsa Indonesia. Selain itu Pancasila berfungsi sebagai lima prinsip bimbingan etika bagi penguasa dan rakyat agar tidak melakukan kekerasan, mencuri, dendam, bohong, dan minum-minum keras,²⁵ karena itu sangatlah signifikan Pancasila dijadikan sebagai resolusi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia.

Di samping itu Pancasila dapat dijadikan sebagai resolusi konflik di Indonesia, karena prinsip kelima dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, diformulasikan oleh Soekarno karena pengakuannya terhadap realitas rakyat Indonesia yang religius, tidak peduli agama apa yang mereka anut. Prinsip ini tampaknya dimaksudkan Soekarno sebagai pengakuan terhadap semua agama yang ada. Tampaknya dia berpikir bahwa semua penganut agama dapat berkerjasama dan bertoleransi agama dapat dicapai, sehingga kesatuan dan integritas nasional akan tumbuh subur dalam atmosfer kemerdekaan Indonesia.²⁶ Gagasan Soekarno ini terbukti menjadi landasan bagi keberlangsungan persatuan bangsa, agama dan tanah air, yang pada gilirannya dapat dijadikan sebagai resolusi konflik antar umat beragama di Indonesia.

2. Undang –Undang Dasar 1945.

Undang–Undang Dasar 1945 juga menjadi salah satu faktor keberlangsungan hidup bangsa Indonesia, karena, karena UUD 1945 itu merupakan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. Bahkan pembukaan dari UUD 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia.²⁷ Oleh karena itu UUD 1945 ini dapat dijadikan sebagai resolusi konflik antar umat beragama, sebab UUD 1945 ini mengandung makna yang dalam, mempunyai nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, Ia

²⁴ Lihat, Azra, *Konflik, op.cit.*, hlm. 144.

²⁵ Lihat, Darji Darmodiharjo, *Pancasila; Suatu Orientasi Singkat*, edisi ke-12, (Jakarta: Aries Lima, 1984), hlm. 23.

²⁶ Lihat, B.R.O. Anderson, *Some Aspects of Indonesian Politics Under Japanese Occupation 1944 - 1945*, (Ithaca : Cornell University, 1991), hlm. 210.

²⁷ Lihat, Makna Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagi perjuangan Bangsa Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, BP- 7 Pusat, 1990, hlm. 46.

mampu menampung dinamika masyarakat beragama, dan tetap menjadi landasan Integrasi bangsa selama bangsa Indonesia ini tetap setia kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

3. Bhinnika Tunggal Ika.

Dalam suasana kebhinnekaan bangsa Indonesia, sebenarnya Pancasila dapat menjadi “Payung bersama” dari semua aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia, apapun suku, agama, dan politiknya, hal ini selaras dengan pandangan Bossona Tibi menyadari bahwa kebhinnikaan menjadi faktor yang niscaya ada dan terelakkan tidak hanya pada kebudayaan masyarakat Internasional, melainkan juga pada masyarakat yang lokal sekalipun.²⁸

Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan, dan kekeluargaan demi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Prinsip dasar kekeluargaan adalah “Kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan”.²⁹ Prinsip kesatuan dan kekeluargaan yang dikembangkan dalam Bhinneka Tunggal Ika itulah merupakan salah satu strategi membangun perdamaian serta keberlangsungan hidup bangsa Indonesia, karena menurut M. Natsir bahwa bagi bangsa Indonesia yang terdiri beberapa suku dan adat-istiadat, serta menganut berbagai agama, dan ideologi, adalah Pancasila sebagai *falsafah* Negara dan pemersatu, sebagaimana dilukiskan dalam semboyan Negara, “Bhinneka Tunggal Ika”, yakni: bersatu sekalipun ada perbedaan ragam.³⁰

4. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pokok-Pokok yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah “Negara” begitu bunyinya “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.³¹ Berdasarkan pengertian inilah, maka

²⁸ Tibi dalam Madjid, *Agama, op.cit.*, hlm.xxii.

²⁹ Slamet Sutrisno, *Filsafat Dan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta : Penerbit CV. Andi Offset, 2006), hlm. 72.

³⁰ M. Natsir, *Agama Dan Negara dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Penerbit, Media Da’wah, Cetakan I, 2001), hlm. 366.

³¹ Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuan: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdarkan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokok pikiran yang hendak

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat dijadikan sebagai resolusi konflik di Indonesia, Sebab dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian bahwa *negara persatuan* adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.

Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatasi segala golongan, mengatasi segala permasalahan antar pemeluk agama, mengatasi segala paham perseorangan, termasuk negara harus dapat mengatasi berbagai isu konflik dan konflik yang terjadi antar umat beragama di Indonesia ini yang tidak boleh dilupakan. Bahkan pokok yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang adalah Negara yang *berkedaulatan Rakyat*, berdasar atas *kerakyatan* dan *permusyawaratan perwakilan*. Oleh karena itu sistem Negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas *kedaulatan rakyat* dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan, hal ini memang sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang majmuk. Disinilah sebenarnya letak keberlangsungan bangsa dan kedamaian antar umat beragama di Indonesia.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, bahwa adanya agama-agama lokal dan mondial di Indonesia dapat menjadi potensi konflik. Sedangkan yang melatarbelakangi terjadinya konflik antar umat beragama adalah di samping penyiaran agama, dan pendirian Ibadah, juga faktor diskriminasi, kesenjangan ekonomi dan perbedaan ideologi. Nemun perbedaan itu, kemudian masyarakat memiliki strategi sendiri untuk membangun resolusi dan suasana perdamaian dengan menggunakan Pendekatan Kultural dalam bentuk aktualisasi kearifan lokal, dan Pendekatan Struktural dalam bentuk aktualisasi lembaga-lembaga keagamaan dan pemerintah, serta dengan Pendekatan Dialog antar umat beragama adalah cara terbaik dalam membuat pengertian guna menegakkan perdamaian.

Di samping itu, keberlangsungan bangsa Indonesia akan sangat tergantung kepada empat hal yaitu, Pertama; Pancasila, karena Pancasila merupakan satu-satunya azas tunggal dalam kehidupan berbangsa, beregama dan bernegara. Kedua; Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum dari motivasi dan aspirasi perjuangan

diwujudkan oleh Negara bagi seluruh rakyat ini didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Lihat, *Undang-Undang Dasar 1945, op.cit.*, hlm. 49.

serta tekad bangsa Indonesia. Ketiga; Bhinneka Tunggal Ika merupakan faktor yang niscaya ada dan tak terelakkan dalam mewujudkan perdamaian, kesatuan dan kekeluargaan dengan mengandung prinsip “Kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan, atau bersatu sekalipun ada perbedaan ragam”. Keempat; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi apabila bangsa Indonesia membumikan beberapa pendekatan, serta menghayati dan mengamalkan empat hal di atas itulah resolusi yang tepat bagi bangsa Indonesia dalam upaya menemukan strategi perdamaian dan mencegah terjadinya konflik, baik antara umat beragama, maupun antar umat beragama di Indonesia. *Wallahu' alam bi al- Shawab.*

DAFTAR PUSTAKA

Ackermann, John, Robert, *Agama Sebagai Kritik Analisis Eksistensi Agama-Agama Besar*, (Jakarta; Penerbit, PT. BPK. Gunung Mulia, 1997).

Al-Munawar, Husain, Agil, Said, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta; Diterbitkan oleh PT. Ciputat Press, 1997).

Anderson, B.R.O, *Some Aspects of Indonesian Politics Under Japanese Occupation, 1944 – 1945*, (Ithaca: Cornell University 1991).

Aziz, Amir, Ahmad, *Neo-Modernisme Islam di Indonesia*, (Jakarta; PT. Rineka Cipta, cetakan, I, 1999).

Azra, Azyumardi, *Konflik Baru Antar Peradaban, Globalisasi & Pluralisme*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Budiman, Arief, (ed.), *State And Civil Society In Indonesia*, (Clayton, Victoria: Center of South East Asean Studies Monash University, 1991).

Chandoke, Neeera, *State And Society: Exploration in Political Theory*, (New Delhi: Sage Publication Indonesia, Pvt., Ltd., 1995).

Darmodiharjo, Darji, *Pancasila; Suatu Orientasi Singkat*, Edisi ke- 12, (Jakarta: Penerbit, Aries Lima, 1984).

Drajat, Zakiyah, *Perbandingan Agama*, (Jakarta: Bumi Aksara, Departemen Agama RI, Cetakan, I. 1996).

Djamari, *Agama Dalam Perspektif Sosiologi*, (Bandung: Penerbit, CV. Alfabeta, Cetakan pertama, 1993).

Fathurrahman, Agus, “Pertentangan-Pertentangan Sosial dan Integrasi Masyarakat”, dalam Darmasyah, *Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986).

Ismail, Faisal, *Ideologi Hegemoni Dan Otoritas Agama, Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999).

Lubis, Ridwan, Syllabus Mata Kuliah “*Agama Dan Perdamaian*”, (Medan: Program Pascasarjana S-3 IAIN Sumatera Utara, 2008).

Lubis, Fadhil, Ahmad, Nur, *Agama Sebagai Sistem Kultural*, (Medan: Penerbit IAIN Press, Cetakan I, 2000).

Madjid, Nurcholis, *Agama Dan Dialog Antar Peradaban*, (Jakarta; Penerbit, Paramadina, 1996).

Natsir, M. *Agama Dan Negara Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Penerbit, Media Da’wah, Cetakan, I. 2001).

Pelikan, Jaroslav, with a Foreword by Clifton Fadiman General Editor, *The World Treasury Modern Religious Thought*, (London: Litle, Brown And Company, 1990).

Ricoeur, Paul, *Lectures On Ideologi And Utopia*, (New York: Colombia Unversiry Press, 1986).

Soetapa, Djaka, *Dialog Kristen – Islam: Suatu Uraian Teologis*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Dan Inivasi Pendidikan, Duta Wacana, 1987).

Sutrisno, Slamet, *Filsafat Dan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta: Penerbit, CV. Andi Offset, 2006).

Syadzali, Munawir, *Agama Dan Pluralisme Masyarakat Indonesia*, (Jakarta; P3M. Cetakan I, 1991).

Thaha, Aziz, Abdul, *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta; Gema Insani Press, 1996).

Yewangoe, A.A, *Agama Dan Kerukunan*, (Jakarta; Penerbit, PT. BPK Gunung Mulia, Cetakan II, 2002).

Yamin, Muhammad, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, (Jakarta: yayasan Prapanca, tt.).

Syukri, dosen Pascasarjana dan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam (FUSI) UIN Sumatera Utara Medan, ia meraih Gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara, Program Studi Aqidah Filsafat (AF) 22 Desember

1994, melanjutkan ke Strata Dua (S2) meraih Gelar Magister of Arts (M.A) dalam bidang Pemikiran Islam (PEMI) pada pascasarjana IAIN Sumatera Utara pada 20 Desember 2003, kemudian melanjutkan ke Strata Tiga (S3) Program Doktor dalam bidang Studi Agama dan Filsafat Islam (AFI) pascasarjana IAIN Sumatera Utara yang dipromosikan pada Selasa, 20 September 2011 di ruang Sidang Terbuka Senat IAIN Sumatera Utara Medan dengan Judul Disertasi: “*Peranan Ulama Dalam Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Aceh*” di bawah Promotor I Bapak Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, M.A., dan Promotor II Bapak Prof. Dr. H. Amroeni Drajat, M.Ag.